

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KENDARAAN UMUM OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) TERMINAL KABUPATEN CIAMIS

Lia Yuliani

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : liayuliani212@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa efektivitas pemungutan retribusi kendaraan umum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya beberapa indikator masalah, yaitu: masih banyaknya angkutan yang tidak masuk ke terminal dengan alasan tidak adanya penumpang, tanggal dan nomor kendaraan dikarcis tidak diisi.. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan retribusi kendaraan umum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan efektif. Masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai, seperti belum adanya sanksi tegas bagi pelanggar dalam pemungutan retribusi, fasilitas dalam pemungutan retribusi masih manual belum menggunakan alat-alat modern seperti mesin karcis otomatis, petugas tidak memasukan tanggal dan nomor kendaraan dikarcis hal ini bisa menyebabkan supir menggunakan karcis yang sama dihari berikutnya. Menurunnya pengguna terminal yang berpengaruh kepada target yang harus tercapai sehingga semangat kerja petugas menurun dan kurangnya kerjasama yang baik antar petugas dan pengguna dalam proses pemungutan retribusi.

Kata Kunci : *Efektivitas, retribus, UPTD, terminal*

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan aspek penting bagi pembangunan suatu wilayah. Transportasi adalah suatu media bagi pergerakan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pembangunan adalah bagian dari upaya

memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan didirikan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, salah satunya adalah transportasi, guna mendorong pembangunan yang merata.

Menurut Adisasmitha (2011) Transportasi adalah sarana penghubung atau yang menghubungkan antar daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Peran transportasi sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Ahmad Munawar dalam Kadir (2006:121) mendefinisikan transportasi sebagai kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Untuk setiap bentuk transportasi terdapat unsur pokok yaitu: jalan, kendaraan dan alat angkutan, tenaga penggerak, dan terminal. Peranan transportasi sungguh sangat penting untuk saling menghubungkan daerah-daerah. Mobilitas penduduk dari tempat ke tempat yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya memerlukan alat transportasi. Salah satu sarana transportasi selain jalan yaitu terminal.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,

menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal adalah tempat dimana penumpang, barang atau jasa keluar masuk. Keberadaan terminal dapat menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.

Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Permenhub No PM 132 Tahun 2015, penyelenggaraan terminal penumpang memiliki tujuan yaitu menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar moda serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan. Agar sebuah terminal benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi umum maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/fasilitas yang ada didalam terminal, serta dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka perlu dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Terdapat unsur penting dalam sebuah terminal penumpang yaitu adanya angkutan umum dan penumpang, tanpa keduanya terminal tidak bermakna apapun, hanya sebatas sebuah bangunan.

Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah termasuk mengutip sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya termasuk sumber pendapatan dari sektor retribusi yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari berbagai pendapatan asli daerah salahsatunya yaitu ada retribusi.

Dalam peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal/SUB Terminal, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikam oleh Pemerintah Daerah untu kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki terminal. Terminal yang ada di Kapupaten Ciamis, salah satunya adalah Terminal Manis Ciamis. Terminal Manis Ciamis

diresmikan tahun 1990 dan mulai beroperasi tahun 1991. Terminal Manis Ciamis termasuk dalam klasifikasi terminal Tipe C dan merupakan terminal lintasan yang melayani angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), perkotaan dan pedesaan yang beroperasi 24 jam. Angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) menangani trayek: Porwokerto, Cilacap, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Tangerang, Merak, Sumatra, Denpasar dan Bali. Sedangkan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) melayani trayek seputas Provinsi Jawa Barat yaitu: Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, Bandung, Bekasi, Sukabumi, Karawang, Cikarang, Depok, Cirebon, Kuningan dan Bogor. Luas keseluruhan terminal dan fasilitas lain yaitu 33.281 M² dan memiliki berbagai fasilitas yang memadai sesuai standar yang ditetapkan untuk sebuah terminal penumpang tipe C seperti parkir (mangkal), jalur lintasan bis 8 jalur dan nonbis 7 jalur, ruang tunggu memiliki kapasitas untuk 144 orang, 1 mushola, 1 WC petugas, 2 WC umum dan 37 kios. Terminal Manis Ciamis memiliki kapasitas lahan parkir 530 kendaraan yaitu 180 kendaraan otobis dan 350 kendaraan non bis. Kapasitas lahan jalur lintas 37 kendaraan yaitu 16 kendaraan otobis dan 21 kendaraan non bis. Rata-rata jumlah kendaraan perhari jika normal yaitu bis besar 120, bis sedang 90, bis kecil 80, mobil

penumpang 60 dan angkutan kota atau angkutan desa 120.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, efektivitas pemungutan retribusi kendaraan umum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator, sebagai berikut:

1. Masih banyaknya angkutan yang tidak masuk ke terminal dengan alasan tidak adanya penumpang. Dengan begitu jika penumpang tidak masuk terminal maka tidak ada pemungutan retribusi. hal ini dikarenakan petugas tidak menerapkan sanksi sehingga yang dipungut mengabaikan.
2. Tanggal dan nomor kendaraan di karcis tidak diisi. Hal ini akan menyebabkan pengguna atau supir akan beralasan sudah membayar padahal karcis yang ditunjukkan karcis yang kemarin.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Pemungutan Retribusi Kendaraan Umum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kabupaten Ciamis?”

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan

pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama Bernard (Mutiarin dan Jaenudin, 2014:96).

Menurut Steers (Sutrisno, 2018:89), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya. Manusia. Dalam penelitian efektivitas organisasi, sumberdaya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia ditempat kerja.

Selanjutnya. Steers (Sutrisno, 2018:89), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu:

1. Optimalisasi tujuan-tujuan;
2. Perspektif system; dan
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Menurut Campbell J.P (Mutiarin dan Jaenudin, 2014:96), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program.
2. Keberhasilan sasaran.

3. Kepuasan terhadap program.
4. Tingkat input dan output.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Ghibson, et. al (Mutiarin dan Jaenudin, 2014:98), menyimpulkan kriteria efektivitas suatu kegiatan kedalam tiga indicator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu:

1. Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (*production*), efisiensi (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*);
2. Efektivitas jangka menengah, meliputi: kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*development*);
3. Efektivitas jangka panjang: keberlangsungan (*sustainability*).

Menurut Munawir (Anggoro et al, 2017:239), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya

didasarkan atas peraturan yang berlaku, Halim (Anggoro et al, 2017:239).

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan efektivitas pemungutan retribusi kendaraan umum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kabupaten Ciamis yang difokuskan pada beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur efektivitas menurut Steers (Sutrisno, 2018:89) yaitu optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Maret 2022 di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kabupaten Ciamis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari Kepala UPTD Terminal (1 orang), petugas pemungut retribusi kendaraan umum (3 orang) dan pengguna atau supir kendaraan umum di Terminal Ciamis (3 orang). Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi kendaraan umum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Ciamis ditinjau berdasarkan tiga konsep untuk mengukur efektivitas sebuah organisasi menurut Steers (Sutrisno, 2018:89), yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tujuan-tujuan.

Menurut W.J.S. Poerdwadarmita (Ali, 2014:348) menyatakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.”

Optimalisasi tujuan-tujuan merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah dibuat. Dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai, dengan pencapaian yang layak maka pelayanan suatu organisasi sudah dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa pemungutan retribusi kendaraan umum mengenai tempat khusus untuk pemungutan retribusi tempatnya sudah strategis hanya saja masih belum dilakukan secara optimal dikarenakan fasilitas yang belum maju karena masih manual belum menggunakan alat-alat modern seperti mesin karcis otomatis yang bisa mengoptimalkan kinerja petugas dalam pemungutan retribusi. Maka dari itu, tersedianya sarana dan

prasarana yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kabupaten Ciamis belum menerapkan sanksi tegas untuk pengguna yang melanggar dalam proses retribusi. Pihak petugas terminal hanya memberikan teguran dan arahan secara berkala agar tidak mengulangi pelanggaran lagi. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pengguna yang susah mengikuti arahan sehingga ada saja yang tidak melengkapi dan memperpanjang surat-suratnya dan menyebabkan pengguna terminal yang melakukan pelanggaran tidak sadar dengan kesalahannya, terus mengulang pelanggaran tersebut dan tidak merasa jera dengan akibat yang melanggar perbuat.

2. Perspektif Sistem.

Menurut Gordon B Davis (Sutabri, 2012:6) menyatakan bahwa:

Sistem bisa berupa abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak yaitu susunan gagasan-gagasan atau konsepsi yang teratur yang saling bergantung. Misalnya sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia dan lain sebagainya. Sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Perspektif sistem adalah salah satu pendukung terwujudnya sebuah

efektivitas dalam organisasi, perspektif sistem ini merupakan sistem yang diciptakan untuk membangun dan mendukung organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan saling berhubungan dan bekerjasama dengan baik antar petugas, petugas dan pengguna maupun antar pengguna akan menciptakan pemungutan retribusi dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa petugas belum mampu menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Hal ini dapat dilihat dari petugas yang tidak semangat, tetapi hal ini tergantung kepada pribadinya masing-masing karena tidak semua petugas seperti itu, tetapi hal ini cukup berpengaruh terhadap proses pemungutan retribusi. Kemudian petugas tidak memasukan tanggal dan nomor kendaraan dikarcis padahal sudah ada tempatnya, hal ini bisa menyebabkan supir menggunakan karcis yang sama dihari berikutnya. Meskipun pihak terminal sudah menerapkan kode warna dikarcis tetap saja harus disertakan tanggal dan nomor kendaraan karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan dalam pemungutan retribusi. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal mampu menerima masukan (input) dan keluaran (output) dengan baik, hal tersebut terlihat dari petugas pemungut retribusi mampu menerima masukan, kritik dan saran dari pengguna maupun dari atasan dengan respon baik dan mampu merealisasikan masukan itu

sendiri ke dalam kehidupan nyata pemungutan retribusi meskipun tindakan tersebut masih belum sempurna tetapi petugas sudah berusaha dalam menjalankannya.

3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Menurut Wijaya (2017:1), menyatakan bahwa:

Perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik dan dilatih, diberi informasi, dilindungi dan dikembangkan. Dengan kata lain, maka perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi.

Perilaku dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap tujuan dan pencapaian setiap organisasi, baik dan buruknya perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam pemungutan retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa kinerja yang baik dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik tetapi belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hambatan yang ditemui yaitu semenjak pandemi pengguna terminal yang masuk menurun dan sepi hal ini berpengaruh kepada target yang harus dicapai. Dengan tidak tercapainya target semangat kerja petugas pun menurun. Dan karena banyak tenaga non PNS atau suka relawan ada saja

yang tidak sesuai kinerjanya. Maka dari itu, keberhasilan organisasi tergantung pada kinerja petugas itu sendiri, jika kinerjanya baik tujuan organisasi akan tercapai, sebaliknya jika kinerjanya buruk tujuan organisasi tidak akan tercapai. Efektivitas pemungutan retribusi terminal mengenai adanya kerjasama yang baik antar petugas dengan pengguna belum optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya pengguna yang tidak masuk ke terminal dan membayar retribusi berarti hal ini menunjukkan masih kurangnya kerjasama dalam proses pembayaran retribusi. Tetapi hubungan pengguna dengan pihak terminal baik, akrab dan sering bertemu sehingga petugas dan pengguna mudah melakukan kerjasama secara baik dan mudah dalam berkomunikasi terutama dalam pemungutan retribusi. Maka dari itu, Setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain, karena tanpa adanya kerjasama dalam pekerjaan akan mengakibatkan kebingungan pada petugas dan tidak memberikan efektivitas dalam pekerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pemungutan Retribusi Kendaraan Umum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan bahwa Efektivitas Pemungutan Retribusi Kendaraan Umum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Terminal Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal, dilihat dari dimensi yang dijadikan alat ukur masih belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti tidak diterapkannya sanksi tegas terhadap pelanggar, belum adanya alat modern seperti mesin karcis otomatis untuk membayar retribusi, petugas tidak memasukan tanggal dan nomor kendaraan dikarcis padahal sudah ada tempatnya, menurunnya pengguna terminal yang berpengaruh kepada target yang harus tercapai, semangat kerja petugas menurun dan kurangnya kerjasama yang baik antar petugas dan pengguna dalam pemungutan retribusi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pihak UPTD Terminal melakukan berbagai upaya seperti dengan terus melakukan perbaikan dalam fasilitas pemungutan retribusi yang lebih modern, melakukan pengarahan dan pendekatan persuasif agar pengguna tidak melakukan pelanggaran, menerapkan kode warna dikarcis retribusi, menyesuaikan target dengan kondisi saat ini (pandemi Covid-19) dan membuat program kerja seperti meningkatkan disiplin pegawai, mempertanggung jawabkan tugasnya, mempertanggung jawabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempertanggung jawabkan lingkungan kerjanya, meningkatkan dan menyadarkan petugas dan pengguna untuk menjalin kerjasama dalam proses pemungutan maupun pembayaran retribusi. Sehingga diharapkan upaya-upaya tersebut bisa menjadi acuan pihak Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Kabupaten Ciamis untuk pemungutan retribusi kendaraan umum agar lebih efektif.

Wijaya, C. (2017). *Prilaku Organisasi*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Anggoro, D.D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Mutiarin, D. & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sutrisno, E. (2018). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal :

Ali, A, M. (2014). *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.com di Samarinda*. EJournal Ilmu Administrasi Bisnis. Vol. 2. No. 3, 346-357.

Undang – Undang :

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal/Sub Terminal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.